TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

NANDA GIAM PUTRA
NIM. 01770613597

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA	: NANDA GIAM PUTRA
NIM	: 01770613597
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL	:ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

PEKANBARU, 28 JANUARI 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak Akt. CA
NIP.19791010 200710 2011

Dekan

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 01

Ketua Program Studi

Jhon Afrizal S, HI, M.A
NIP.19790911 20110 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NANDA GIAM PUTRA

NIM : 01770613597

PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DARAH PROVINSI RIAU

TAGGAL UJIAN : 18 JANUARI 2022

Disetujui oleh :

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. jhon Afrizal S.HI, M.A
NIP.19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
NIK. 130712072

PENGUJI II

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NANDA GIAM PUTRA

NIM : 0177 0613 597

Tempat/Tg.Lahir : TASIK SERAI 20 - MEI - 1998

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * :

ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 JANUARI 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 0B900AJX652524063

NANDA GIAM PUTRA

NIM 0177 0613597

- *Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

Nanda Giam Putra
NIM. 01770613597

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan *daerah Provinsi Riau yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang di pungut oleh pemerintah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam undang-undang tersebut terdapat kebijakan khusu mengenai pajak rokok. Disebutkan bahwa pajak rokok digunakan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dibidang rokok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alokasi bagi hasil penerimaan dana pajak rokok di Provinsi Riau. Metode yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini pene rimaan dana bagi hasil pajak rokok pada Provinsi Riau berjalan sebagaimana peraturan yang di tetapkan. Alokasi dana bagi hasil dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten/atau kota terhadap rasio jumlah penduduk provinsi. Dana bagi hasil pajak rokok tersebut selanjutnya masuk kedalam kas daerah kabupaten/kota. Baik dari provinsi dan kabupaten/kota bagi hasil dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% ke bagian kesehatan dan penegakkan hukum.*

Kata kunci: Penerimaan, Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil, Kendala dan Upaya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga peneliti diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul, **"Analisis Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau."** Ini dapat diselesaikan tanpa ada suatu hambatan yang berarti.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, amiin. Dalam penulisan tugas akhir ini peneliti menyadari ada kelebihan dan kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam tugas akhir ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam tugas akhir ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari peneliti sendiri. Hal ini tiak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang peneliti miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, terutama Ibu dan Ayah serta abang-abang saya yang selalu mencurahkan do'a, nasehat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan moril dan materi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyani, SE, MM selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta pembantu Dekan I, II, III atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Jhon Afrizal SHI, MA selaku ketua jurusan D3 Administrsi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku sekretaris jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Akt. CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, masukan dan motivasi yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terkait dan yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala administrasi dikampus.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Seluruh pegawai dikantor Badan Pendapatn Daerah Provinsi Riau yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Angkatan 2017 Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang telah membantu peneliti dalam menelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua orang yang terlibat dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang di inginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Nanda Giam Putra

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Metode Pengamatan 8
1.6 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .. 12
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 13
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 15
2.4 Struktur Organisasi ……..…….. 33

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori 34
3.1.1 Pengertian Pajak 34
3.1.2 Fungsi Pajak 36
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak 37
3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 39
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 40
3.1.6 Pengertian Pajak Daerah 41
3.1.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah 41
3.1.8 Pajak Rokok 44
3.1.9 Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam 49
3.2 Tinjauan Praktek 52
3.2.1 Apakah Terjadi Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Setiap Tahunnya Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 52
3.2.2 Bagaimana Penerapan Earmarking Tax Terhadap Dana Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 55

3.2.3 Upaya Apa Saja Yang Di Lakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Untuk Mengingkatkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesimpulan 59

4.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Proivinsi Riau Tahun 2018-2021..... 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 33

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

2. Surat Bimbingan Laporan Penelitian

3. Surat Izin Penelitian

4. Surat Pemberian izin Riset

5. Nota Dinas

6. Biografi Penulis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan Perpajakan Daerah salah satunya yaitu dengan menetapkan UndangUndang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997. UU No. 28 Tahun 2009 di sahkan oleh DPR pada 18 agustus 2009 diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Salah satu jenis pajak baru dalam Undang-Undang (UU) tersebut adalah pajak Rokok.

Sesuai dengan Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok berlaku mulai dari januari tahun 2014. Pajak Rokok merupakan salah satu pajak daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat kemudian di setor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Pajak Rokok akan masuk ke RKUD provinsi sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan akan di transfer ke Kabupaten/Kota. Tujuan utama penerapan pajak rokok selain untuk menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.

Oleh karena itulah dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk berusaha berhenti merokok agar tetap terjaga kesehatannya dan orang disekitarnya. Penerapan pajak rokok juga dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Penggunaan pajak rokok diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok sedangkan tarif pajak rokok ditetapkan 10 % dari cukai rokok tersebut. Besaran Pokok pajak rokok dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam pasal 94 ayat (1) butir c di jelaskan bahwa hasil penerimaan pajak rokok di serahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dan 30 % akan di serahkan kepada provinsi. Sementara dalam pasal 31 dijelaskan bahwa penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota akan dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Secara efektif pemberlakuan pajak rokok ini baru akan diterapkan pada tahun 2014. Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2014 derah provinsi dapat memungut jenis pajak baru yakni pajak rokok. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan pajak rokok, yaitu :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau.
2. Perlunya peningkatan *local taxing power* guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan.
3. Perlunya penerapan *piggyback taxes*, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yg perlu dikendalikan, sesuai dengan *best practice* yg berlaku di negara lain.
4. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.

Dari data yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai penerimaan bagi hasil Pajak Rokok dapat dilihat dari pencapaian target dan realisasi penerimaan Pajak Rokok di Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagaimana terlihat dari gambar dalam tabel I.I berikut ini:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel I.I

REKAPITULASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Tahun 2018-2021

No	TAHUN	TARGET PENERIMAAN	PENYALURAN			
			TEREALISASI	PEMOTONGAN IURAN UNTUK BPJS KESEHATAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi RIAU	Jumlah % (Persentase)
1	2018	415.958.595.849,99	366.921.995.558,00	34.160.333.065	332.761.662.493	80,00%
2	2019	382.062.324.828,80	348.355.591.901,00	35.467.080.572	312.888.511.329	81,89%
3	2020	391.504.647.044,00	445.255.344.374,00	10.467.531.985	434.787.812.389	111,06%
4.	2021	407.340.097.672,00	352.707.553.389,00	22.880.882.919	329.826.670.470	80,97%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021.

Dari tabel I.I dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Rokok tahun 2018-2021 dinilai sudah efektif dalam penerimaan dana bagi Hasil Pajak Rokok di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan yang setiap tahunnya meningkat. Ditahun 2020 realisasi dana bagi hasil Pajak Rokok di Provinsi Riau meningkat secara drastis yaitu sebesar Rp 445.255.344.374,00 dengan persentase sebesar 111,06% dari target penerimaan sebesar Rp 391.504.647.044 terjadi peningkatan yang sangat efektif ditahun 2020.

Penerapan *earmarking tax* terdapat dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan diterapkannya peraturan

earmarking tax ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, manfaat lain yang bisa didapatkan dari penerapan *earmarking tax* ini adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan.

Berbagai upaya terus dilakukakan Badan Pendapatan Provinsi Riau agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Rokok berupa sosialisasi pemahaman tentang pentingnya membayar kewajiban Pajak Rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum.

Dalam rangka perluasan basis pajak daerah, maka pajak rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Rokok termasuk ke dalam pajak Provinsi. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pajak di pungut di tingkat pabrik/importer bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh instusi yang berwenang memungut cukai, yaitu DJBC.

Selanjutnya cukai hasil tembakau masuk ke rekening Pemerintah Pusat sedangkan pajak rokok ditampung di rekening Antara untuk kemudian disetorkan ke rekening kas pemerintah daerah provinsi melakukan bagi hasil atas penerimaan pajak rokok kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pabrik/importer cukai PPN Pajak Rokok 10% Rekening Pusat Rekening Antara Rekening Daerah/Provinsi Kab/Kota Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Perda (Peraturan Pemerintah Daerah) untuk pajak rokok yaitu PERDA Nomor 8 Tahun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2013 pada tanggal 18 Novermber 2013 lalu. Dari jumlah pajak rokok pusat yang berjumlah 116 Triliun, dibagikan untuk daerah sebesar 10% nya yaitu sebesar 11 Triliun. Diperkirakan Provinsi Riau dapat meraup dana Rp. 180 Miliar yang akan disalurkan guna meningkatkan fasilitas kesehatan daerah melalui dinas pendapatan Provinsi Riau pajak rokok tersebut akan disalurkan dan akan menambah pendapatan asli Daerah Provinsi Riau serta dapat digunakan untuk mengembangakan dan meningkatkan pembangunan dan layanan kesehatan di Provinsi Riau. Dari masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan judul: "ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi peningkatan peneriman bagi hasil Pajak Rokok setiap tahunnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

2. Bagaimanakah penerapan *earmarking tax* terhadap dana bagi hasil dari Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

3. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil Pajak Rokok?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peningkatan penerimaan bagi hasil Pajak Rokok setiap tahunnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Earmarking tax* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan dana bagi hasil Pajak Rokok di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penulisan ini semoga memproleh manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pajak rokok, dan penulisan ini semoga berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi peneliti.

2. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pajak rokok.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditemui dalam penerimaan bagi hasil pajak rokok.

4. Memberikan informasi kepada masyarakat/wajib pajak tentang perpajakan terutama pajak rokok.

1.5 Metode Pengamatan

A. Tempat dan Waktu Pengamatan

Penulisan tugas akhir ini memperoleh data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penulisan tugas akhir ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari 1 November 2020 sampai 15 januari 2021.

B. Jenis Data

Adapun jenis data pengambilan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan data primer adalah data yang di peroleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai seksi hubungan dan masyarakat BAPENDA yang berkaitan dengan masalah penulisan tugas akhir ini. Sumber data primer seperti daftar penerimaan pajak dari sektor Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs web, internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir. (Uma Sekaran, 2011:76)

C. Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan Tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wawancara bermakna berhadapan langsung Antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko Subagyo,2011:39)

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) suatu cara yang digunakan untuk memproleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

D. Analisis Data

Data atau dekomentasi yang diproleh dari hasil penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29)

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, motode pengamatan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, hak dan kewajiban pajak, pajak menurut syariah, pengertian, fungsi, dasar hukum, dan tata cara penerimaan bagi hasil pajak rokok.

BAB IV **PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan hasil dari pengamatan serta membuat kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39- 29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal

49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat Idengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 37/11/1982tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau KabupatenDaerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau KabupatenDaerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan KabupatenDaerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

A. Visi

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H. Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

A. Sekretariat terdiri dari:
   a. Subbagian perencanaan program
   b. Subbagian keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah
   c. Subbagian kepegawaian dan umum
B. Bidang Pajak daerah terdiri dari:
   a. Subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor
   b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya
   c. Subbidang verivikasi dan pelaporan pajak daerah
C. Bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dan bagi hasilterdiri dari:
   a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya
   b. Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak
   c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak

D. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari:

a. Subbidang pengembangan sistem informasi

b. Subbidang pengembangan pendapatan

c. Subbidang pengolahan data pendapatan

E. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan terdiri dari:

a. Subbidang pembukuan dan pelaporan

b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah

c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan program

Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
3. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
5. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.

4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.

5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset.

6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.

8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

9. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

10. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;

11. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban dan pencatatan aset.

12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:SS

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
7. Melakukan evaluasi terhada prealisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Pajak Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya.
5. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
8. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
9. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
10. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
11. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
3. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota.
5. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah.
6. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

10. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuai perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
5. Melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
6. Menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. **Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah.
6. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
6. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

14. Kepala Subbidang Pengembangan sistem Informasi

Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
3. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
4. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
6. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
7. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
8. Menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
9. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistim Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan.
10. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
11. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
12. Melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
13. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan.
15. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan.
3. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
5. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah.
6. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
3. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan.
5. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan.
6. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
7. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah,dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

18. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
3. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern.
5. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasandan Penerimaan Daerah.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit PelaksanaTeknis/Unit Pelaksana Pendapatan.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasandan Penerimaan Daerah, dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

20. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada SubbidangTindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
3. Menfasilitasi TindakLanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.
4. Melakukan pemutakhiran TindakLanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala.
5. Memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
7. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Struktur Organisasi

Gambar II.I
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

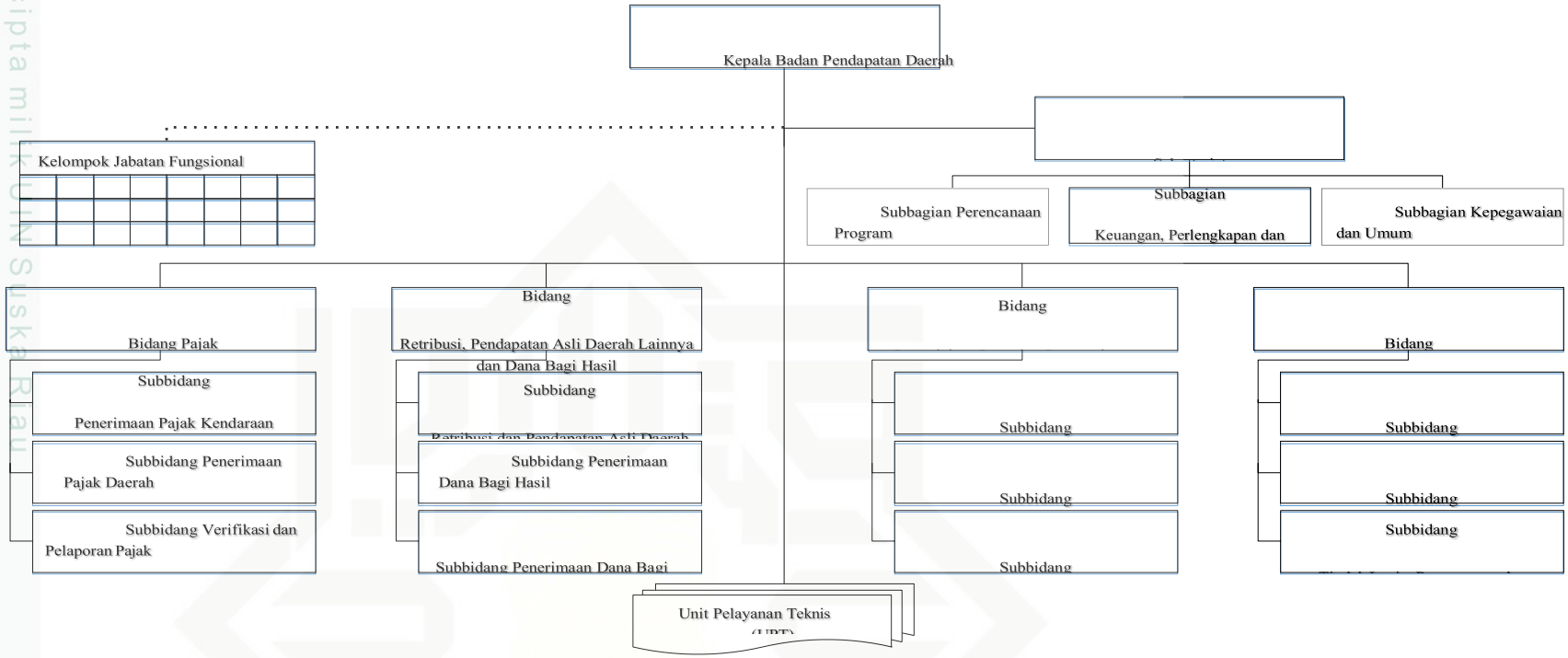

Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpuan yaitu:

1. Terjadinya peningkatan penerimaan DBH (dana bagi hasil) Pajak Rokok di Provinsi Riau adalah tingkat kepatuhan para Wajib Pajak (WP), serta faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan bagi hasil Pajak Rokok adalah dengan adanya kenaikan tarif efektif PPN dan cukai rokok ini akan meningkatkan besarnya pajak yang dikenakan atas rokok sehingga harga jual rokok akan meningkat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Rokok lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan persentase sebesar 111,06% dengan realisasi sebesar RP 445.255.344.374.

2. Penerapan *earmarking tax* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terdapat keuntungan serta kelebihan dalam penerapannya yaitu keuntungannya adalah *earmarking tax* dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak dan memberikan jaminan minimum pembiayaan public tanpa campur tangan dari yang lain. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan dari *earmarking tax* juga terdapat beberapa hal seperti

membawa pada kesalahan alokaasi sumber daya penerimaan dan bisa membuat anggara menjadi tidak fleksibel.

3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan DBH Pajak Rokok adalah terus melakukan pengawasan serta perencanaan terhadap anggaran yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau agar dapat terlaksana sesuai dengan yang telah dibuat. Serta kualitas terhadap pelayanan WP (Wajib Pajak) agar terus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tercapainya sesuatu yang diinginkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan DBH Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang ada di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan tingkat pelayanan termasuk menindak tegas Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban Pajak Rokok dan menunjuk petugas lapangan khusus dalam hal pemungutan Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya agar segera megeluarkan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana alokasi DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Rokok sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan di Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Supaya alokasi dana bagi hasil Pajak Rokok tidak salah sasaran dan tumpang tindih dengan dana yang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Andi, 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Halim, Abdul. Dara, Amin Rangga Bawono, Icuk. 2014. Perpajakan: *Konsep, Apikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Affistet

MJH Smeeths dalam. H. Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Unri Press. Pekanbaru. 2011

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pajak

Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Pajak Rokok

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 buku 1, Jakarta: Salemba Empat

Samudra, Aziz Azhari. 2015. *Perpajakan diIndonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Siahaan, Marihot P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Sakemba Empat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah terjadi peningkatan penerimaan pajak rokok setiap tahunnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

2. Upaya apa yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan dana bagi hasil pajak rokok?

3. Bagaimana penerapan Earmarking Tax terhadapat dana bagi hasil dari pajak rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ?

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43855

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN KTI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4911/2021 Tanggal 20 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**NANDA GIAM PUTRA**
2. NIM / KTP	:	01770613597
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**ANALISIS PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 September 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4911/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 20 September 2021 M
12 Safar 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Nanda Giam Putra
NIM. : 01770613597
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Analisis Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak pada Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS

Nanda Giam Putra, lahir di Tasik Serai, 20 Mei 1998 yang merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Gataruddin dan Ibu Saham dan mempunyai saudara yang bernama Nugrah Giam Putra dan Fadjar Giam Putra.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 027 Tasik Serai (2004-2010), MTS Hubbul Bilad (2010-2013) SMAN 4 Pinggir (2014-2016). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Juli-Agustus 2020) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul : **" Analisi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau "**

Pengalaman berorganisasi yang penulis lakukan selama mengenyam pendidikan bermula dari SMAN yaitu organisasi OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) menjabat sebagai bidang Keagamaan, dilanjut di bangku perkuliahan yaitu masuk di organisasi HMJ D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan).